

## PERAN DJUANDA KARTAWIDJAJA DALAM KABINET KABINET KERJA I-III SOEKARNO 1959 – 1963

Andi Pratama Aji<sup>1</sup>, Eko Ribawati<sup>2</sup>

Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang

E-mail: \* [andi.pp1717@gmail.com](mailto:andi.pp1717@gmail.com)<sup>1</sup>, [eko.ribawati@untirta.ac.id](mailto:eko.ribawati@untirta.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Ir. Djuanda Kartawidjaja dalam Kabinet Kerja I-III pada masa pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1959–1963. Periode ini merupakan fase penting dalam sejarah Indonesia, di mana sistem Demokrasi Terpimpin menggantikan Demokrasi Parlementer. Djuanda berperan strategis sebagai teknokrat yang menjembatani antara idealisme politik Soekarno dengan rasionalitas birokrasi negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran Djuanda dalam bidang politik, ekonomi, diplomasi, serta kontribusinya dalam kebijakan maritim melalui Deklarasi Djuanda. Penelitian ini menggunakan metode historis dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi untuk memperoleh pemahaman faktual dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Djuanda tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan negara, tetapi juga sebagai perancang konsep strategis yang memperkuat kedaulatan dan kesatuan wilayah Indonesia. Melalui kebijakan maritim dan kepemimpinannya dalam Kabinet Kerja, Djuanda turut membentuk identitas Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat secara politik dan ekonomi.

### Kata kunci

**Djuanda Kartawidjaja, Kabinet Kerja, Demokrasi Terpimpin, Deklarasi Djuanda, Politik Maritim**

### ABSTRACT

*This study discusses the role of Ir. Djuanda Kartawidjaja in the Working Cabinets I-III during President Soekarno's administration from 1959 to 1963. This period marked a crucial transition in Indonesian history when Guided Democracy replaced Parliamentary Democracy. Djuanda played a strategic role as a technocrat bridging Soekarno's political idealism and the bureaucratic rationality of the state. The purpose of this study is to examine Djuanda's role in politics, economics, diplomacy, and his contribution to maritime policy through the Juanda Declaration. This research uses the historical method, including the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, to achieve factual and contextual understanding. The results show that Djuanda was not only a policy executor but also a strategic designer who strengthened Indonesia's sovereignty and territorial unity. Through his maritime policies and leadership in the Working Cabinets, Djuanda contributed to shaping Indonesia's identity as a politically and economically sovereign archipelagic nation.*

### Keywords

***Djuanda Kartawidjaja, Working Cabinets, Guided Democracy, Juanda Declaration, Maritime Politics***

## 1. PENDAHULUAN

Periode pemerintahan Presiden Soekarno antara tahun 1959–1963 merupakan salah satu masa paling penting dalam sejarah perpolitikan modern Indonesia. Setelah keluarkannya Dekret Presiden tertanggal 5 Juli 1959, Indonesia meninggalkan sistem Demokrasi Parlementer dan memasuki era Demokrasi Terpimpin, di mana Presiden memegang kuasa mutlak tentang bagaimana arah kebijakan politik dan pembangunan nasional. Dalam konteks inilah lahir Kabinet Kerja I-III, yang menjadi bagian utama bagi

Soekarno untuk mengimplementasikan konsep Demokrasi Terpimpin. Salah satu tokoh penting kabinet ini adalah Ir. Djuanda Kartawidjaja, seorang teknokrat profesional yang berperan sentral dalam menyusun kebijakan ekonomi, politik, dan diplomasi pemerintahan Soekarno era Demokrasi Terpimpin.

Djuanda dikenal sebagai pejabat non-partisan atau Independen yang memiliki integritas tinggi dan keahlian administratif yang kompeten. Ia dipercaya oleh Soekarno untuk menjabat sebagai Menteri Utama dan mengoordinasikan berbagai kementerian agar kebijakan pemerintahan berjalan efisien dan sesuai keinginan Soekarno. Peran Djuanda tidak terbatas pada urusan teknis, tetapi juga mencakup penyusunan strategi pembangunan nasional dan perumusan konsep Negara Kepulauan Indonesia melalui Deklarasi Djuanda (1957) yang kemudian diakui dunia internasional. Seperti dijelaskan oleh Simanjuntak (2003), "Djuanda merupakan teknokrat yang dipercaya Soekarno dalam menyusun kebijakan di Kabinet Kerja" (hlm. 122).

Dalam dinamika politik yang kompleks di era Demokrasi Terpimpin, Djuanda menjadi jembatan antara ideologi politik Soekarno dan rasionalitas birokratis pemerintahan. Ia berkontribusi dalam memperkuat stabilitas politik, mengembangkan kebijakan ekonomi terpimpin, dan memperluas diplomasi maritim Indonesia di dunia internasional. Penelitian ini dilakukan untuk memahami peran strategis Djuanda Kartawidjaja dalam Kabinet Kerja I-III mampu memberikan dampak terhadap pembentukan struktur politik dan kedaulatan Indonesia di masa pemerintahan Soekarno era Demokrasi Terpimpin.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai peran Djuanda Kartawidjaja dalam Kabinet Kerja I-III Soekarno menggunakan metode historis, yaitu sebuah metode ilmiah yang bertujuan untuk merekonstruksi masa lalu berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari sumber sejarah. Metode ini digunakan untuk memahami peristiwa politik, ekonomi, dan diplomasi secara kronologis dan kontekstual. Menurut Gottschalk (1985), "Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau untuk menemukan fakta yang dapat dipercaya" (hlm. 32). Hal ini menunjukkan bahwa penelitian sejarah tidak hanya mengumpulkan data, tapi juga menafsirkan makna dari data tersebut dalam konteks ruang dan waktu tertentu.

Dalam penerapannya, metode historis mencakup beberapa tahapan utama, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Heuristik adalah tahap pengumpulan sumber sejarah, baik primer maupun sekunder, yang relevan dengan topik penelitian. Sumber primer dalam kajian ini meliputi dokumen resmi, arsip kabinet, dan pidato Djuanda, sedangkan sumber sekunder berupa buku, jurnal, serta karya ilmiah yang telah membahas konteks politik era Demokrasi Terpimpin. Sjamsuddin (2012) menjelaskan bahwa "Langkah pertama dalam penelitian sejarah adalah menemukan sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian dan menilai kredibilitasnya" (hlm. 69).

Tahap selanjutnya adalah kritik sumber, yaitu menilai keaslian dan keabsahan sumber. Kritik dilakukan dalam dua bentuk: kritik ekstern untuk memastikan otentisitas dokumen, dan kritik intern untuk menguji kredibilitas isi. Setelah itu dilakukan interpretasi, yakni menafsirkan makna dari fakta sejarah yang telah diverifikasi. Menurut Kuntowijoyo (2003), "Sejarah tidak hanya menceritakan fakta, tetapi juga memberikan penjelasan tentang hubungan sebab-akibat antara fakta-fakta tersebut" (hlm. 89). Dalam

konteks ini, peran Djuanda ditafsirkan bukan hanya sebagai tokoh administratif, tetapi sebagai agen perubahan yang berkontribusi terhadap pembentukan negara kepulauan dan konsolidasi pemerintahan Soekarno.

Tahap berikutnya adalah historiografi, yaitu penulisan sejarah secara sistematis dan kronologis. Penulisan dilakukan dengan menggabungkan hasil interpretasi fakta menjadi narasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Marwick (2001) menyatakan bahwa "Historiografi modern menekankan pentingnya analisis kritis terhadap sumber dan argumentasi logis dalam penulisan sejarah" (hlm. 72). Oleh karena itu, metode historis tidak hanya berfungsi untuk merekam masa lalu, tetapi juga untuk memberikan pemahaman ilmiah terhadap proses perubahan sosial-politik yang terjadi.

Dalam penelitian ini, metode historis digunakan untuk mengungkap konteks peran Djuanda Kartawidjaja secara menyeluruh, mulai dari posisi politiknya di Kabinet Kerja, kontribusinya dalam bidang ekonomi dan diplomasi, hingga warisannya dalam kebijakan maritim Indonesia. Melalui pendekatan historis, peneliti dapat menelusuri kronologi kebijakan yang dibuat Djuanda dan menganalisis pengaruhnya terhadap struktur pemerintahan Soekarno. Dengan demikian, metode ini menjadi dasar ilmiah yang kuat dalam merekonstruksi kontribusi Djuanda terhadap sejarah politik dan maritim Indonesia modern.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kabinet Kerja I-III: Komposisi dan Program**

Keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959, sistem pemerintahan Indonesia dari awalnya Demokrasi Parlementer berubah menjadi Demokrasi Terpimpin, yang mana Presiden Soekarno mengambil peran lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan politik dan pemerintahan. Dalam konteks inilah dibentuk Kabinet Kerja I (1959–1960), bertujuan untuk memulihkan stabilitas politik, memperkuat ekonomi nasional, dan menegakkan kembali kedaulatan negara. Kabinet ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri, sementara Ir. Djuanda Kartawidjaja menjabat sebagai Menteri Utama (Simanjuntak, 2003, hlm. 215). Djuanda dikenal sebagai sosok teknokrat yang amat dipercaya Soekarno karena kemampuannya dalam merumuskan kebijakan praktis di tengah kondisi politik yang tidak stabil kala itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Simanjuntak (2003), "Djuanda merupakan teknokrat yang dipercaya Soekarno dalam menyusun kebijakan di Kabinet Kerja" (hlm. 122).

Program utama Kabinet Kerja I meliputi penataan kembali ekonomi nasional, penyederhanaan administrasi negara, serta penegasan politik luar negeri bebas aktif. Kebijakan ekonomi diarahkan untuk mengendalikan inflasi dan memperbaiki keseimbangan keuangan negara pasca masa Demokrasi Liberal yang penuh ketidakpastian. Menurut Lindblad (2011), "Kebijakan ekonomi pasca-kolonial banyak ditentukan oleh teknokrat Indonesia, salah satunya Djuanda Kartawidjaja" (hlm. 78), hal ini menandakan pentingnya peran Djuanda untuk menjaga arah kebijakan ekonomi nasional yang lebih mandiri.

Memasuki masa Kabinet Kerja II (1960–1962), komposisi pemerintahan mengalami perubahan seiring semakin kuatnya posisi politik Soekarno sebagai satu satunya tokoh dominan dalam menentukan kebijakan. Kabinet ini lebih menekankan pada konsepsi ekonomi terpimpin dan persiapan konfrontasi terhadap Belanda terkait pembebasan Irian Barat atau sekarang dikenal Papua. Menurut Ricklefs (2008),

"Demokrasi Terpimpin merupakan masa konsolidasi kekuasaan Soekarno dengan melibatkan peran teknokrat" (hlm. 300). Peran Djuanda di kabinet ini tetap signifikan sebagai jembatan antara kebijakan politik Soekarno dan realitas teknis pemerintahan. Ia memimpin berbagai dewan ekonomi dan menjadi tokoh penggerak dalam koordinasi antar kementerian atau Lembaga untuk menyuksekan program ekonomi terpimpin yang dibawa Soekarno.

Kemudian, Kabinet Kerja III (1962–1963) dibentuk dengan fokus pada konsolidasi ekonomi dan peningkatan ketahanan nasional. Pada masa ini, program utama kabinet diarahkan pada pembangunan infrastruktur, penataan birokrasi, dan penguatan sektor maritim, yang merupakan kelanjutan dari visi Djuanda sejak 1957 melalui Deklarasi Djuanda. Seperti dijelaskan oleh Cribb dan Ford (2009), "Konsep negara kepulauan yang lahir dari Deklarasi Djuanda menjadi dasar diplomasi maritim Indonesia" (hlm. 40). Pandangan ini menunjukkan kesinambungan antar kebijakan dan kabinet yang berubah dan gagasan maritim Djuanda.

Selain bidang ekonomi dan maritim, kabinet-kabinet ini juga menekankan pentingnya politik luar negeri bebas aktif yang berorientasi pada solidaritas Asia-Afrika dan anti-imperialisme barat. Hal ini sependapat dengan Butcher (2009), yang menyatakan bahwa "Deklarasi Djuanda menandai perubahan paradigma besar dalam hukum laut internasional dengan menegaskan kedaulatan Indonesia atas laut di antara pulau-pulau" (hlm. 36). Djuanda bukan hanya seorang teknokrat administratif, tetapi juga tokoh strategis dalam membentuk arah kebijakan politik nasional dan internasional Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno pada era ini.

Kabinet Kerja I-III mencerminkan perpaduan antara idealisme politik Soekarno dan profesionalisme teknokrat seperti Djuanda Kartawidjaja. Menurut Kartodirdjo (1984), "Periode Demokrasi Terpimpin memperlihatkan peran teknokrat dalam kabinet Soekarno, terutama Djuanda" (hlm. 215). Program-programnya menekankan pembangunan ekonomi terpimpin, kedaulatan wilayah, dan penguatan identitas nasional melalui prinsip negara kepulauan.

### **Peran Djuanda dalam bidang politik, ekonomi, dan diplomasi**

Peran Ir. Djuanda Kartawidjaja pada masa Kabinet Kerja I-III (1959–1963) mencerminkan seorang teknokrat menjadi penghubung antara idealisme politik Soekarno dengan kebutuhan rasional pemerintahan. Dalam bidang politik, Djuanda berperan sebagai figur netral diantara ketegangan kekuatan militer dengan partai politik. Menurut Simanjuntak (2003), "Djuanda merupakan teknokrat yang dipercaya Soekarno dalam menyusun kebijakan di Kabinet Kerja" (hlm. 122). Kepercayaan tersebut membuat Djuanda sering ditugaskan Soekarno untuk memimpin sidang kabinet serta menengahi perbedaan pendapat yang ada antar kementerian saat siding kabinet. Ia dikenal tidak mempunyai ambisi dalam politik, namun justru karena itu ia dipercaya untuk menjaga keseimbangan antara kelompok nasionalis, militer, dan komunis (Simanjuntak, 2003).

Secara ideologis, Djuanda mendukung gagasan Demokrasi Terpimpin yang digagas Soekarno, tetapi ia berusaha mempertahankan prinsip rasional dalam penyusunan kebijakan negara. Menurut Ricklefs (2008), "Demokrasi Terpimpin merupakan masa konsolidasi kekuasaan Soekarno dengan melibatkan peran teknokrat" (hlm. 300). Djuanda menempatkan dirinya sebagai pelaksana kebijakan yang mengutamakan efisiensi dan stabilitas pemerintahan. Ia juga memimpin pembentukan Dewan Ekonomi Nasional dan Dewan Pertimbangan Agung yang berfungsi memberi masukan teknis terhadap kebijakan politik Soekarno.

Dalam bidang ekonomi, kontribusi besar terhadap stabilisasi keuangan negara pasca masa Demokrasi Liberal. Sebagai Menteri Utama dan mantan Menteri Keuangan, ia berupaya memperbaiki defisit anggaran dan mendorong kebijakan nasionalisasi perusahaan asing. Lindblad (2011) menegaskan bahwa “Kebijakan ekonomi pasca-kolonial banyak ditentukan oleh teknokrat Indonesia, salah satunya Djuanda Kartawidjaja” (hlm. 78). Di bawah koordinasi Djuanda, pemerintah meluncurkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) sebagai dasar perencanaan pembangunan terpimpin. Program ini bertujuan menciptakan swasembada ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada pihak asing.

Selain itu, Djuanda juga menjadi arsitek dalam restrukturisasi kebijakan fiskal dan moneter. Ia menekankan pentingnya peranan negara dalam mengatur ekonomi sesuai prinsip “ekonomi terpimpin”. Sejalan dengan pandangan Redfern (2010) yang menyatakan, “Pengambilalihan perusahaan asing pada awal Demokrasi Terpimpin tidak bisa dilepaskan dari peran teknokrat yang menjadi penasehat utama Soekarno” (hlm. 440). Djuanda, sebagai tokoh independen, membantu Soekarno menjadi penyeimbang antara ide sosialisme Indonesia dengan kebijakan ekonomi pragmatis untuk menjaga kestabilan nasional.

Dalam bidang diplomasi, Djuanda menonjol terutama dalam kebijakan maritim dan hubungan internasional. Ia menjadi tokoh utama di balik Deklarasi Djuanda tahun 1957, yang masih menjadi dasar hukum laut Indonesia hingga kini. Butcher (2009) menulis bahwa “Deklarasi Djuanda menandai perubahan paradigma besar dalam hukum laut internasional dengan menegaskan kedaulatan Indonesia atas laut di antara pulau-pulau” (hlm. 36). Konsep negara kepulauan bukan sekadar doktrin hukum, melainkan strategi diplomatik untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

Selama masa Kabinet Kerja I sampai III, gagasan maritim yang digagas Djuanda dilanjutkan dalam berbagai forum diplomatik. Tangkilisan (2022) menjelaskan bahwa “Konsepsi negara kepulauan yang dicetuskan dalam Deklarasi Djuanda akhirnya memperoleh legitimasi internasional melalui UNCLOS 1982” (hlm. 114). Dengan hal ini, diplomasi maritim yang digagas Djuanda terbukti memiliki dampak jangka panjang bagi posisi Indonesia di bidang hukum laut internasional. Djuanda juga aktif dalam memperkuat hubungan politik luar negeri yang bebas aktif, khususnya melalui konferensi Asia-Afrika lanjutan dan juga Gerakan Non-Blok. Seperti dijelaskan oleh Cribb dan Ford (2009), “Konsep negara kepulauan yang lahir dari Deklarasi Djuanda menjadi dasar diplomasi maritim Indonesia” (hlm. 40).

Dari segi kepemimpinan, Djuanda dikenal sebagai figur yang memadukan rasionalitas administratif dengan idealisme nasionalisme. Menurut Kartodirdjo (1984), “Periode Demokrasi Terpimpin memperlihatkan peran teknokrat dalam kabinet Soekarno, terutama Djuanda” (hlm. 215). Ia menjadi ikon birokrat profesional yang tidak terlibat konflik ideologis, tetapi justru mengukuhkan hala tuju pembangunan politik dan ekonomi nasional. Djuanda memadukan kepentingan politik Soekarno dengan kebutuhan diplomasi nyata yang mampu mempertahankan kedaulatan dan stabilitas Indonesia di tengah dinamika dunia.

Djuanda Kartawidjaja bukan sekadar pejabat kabinet, tetapi juga perancang arah tuju kebijakan negara di bidang politik, ekonomi, dan diplomasi. Melalui perannya dalam Kabinet Kerja I-III, Djuanda berhasil menempatkan Indonesia di posisi lebih kuat baik dalam stabilitas internal maupun pengakuan internasional berkat kebijaksanaan nya politik, kecakapan ekonomi, dan visi diplomatiknya terhadap kedaulatan bangsa Indonesia.

## Kontribusi Djuanda dalam kebijakan maritim dan Deklarasi Djuanda

Kebijakan maritim Indonesia pada masa Kabinet Kerja I-III (1959–1963) tidak dapat dilepaskan dari peran sentral Ir. Djuanda Kartawidjaja, yang menjadi arsitek utama konsep negara kepulauan Indonesia. Meskipun Deklarasi Djuanda dikeluarkan pada 13 Desember 1957, penerapan nyata berlangsung dalam masa Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Soekarno. Djuanda berperan besar dalam memastikan bahwa prinsip Wawasan Nusantara dan kedaulatan atas laut antar pulau menjadi bagian integral dari kebijakan nasional. Menurut Butcher (2009), "Deklarasi Djuanda menandai perubahan paradigma besar dalam hukum laut internasional dengan menegaskan kedaulatan Indonesia atas laut di antara pulau-pulau" (hlm. 36). Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan maritim yang digagas Djuanda bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi manifestasi politik kedaulatan bangsa.

Dalam konteks Kabinet Kerja I, fokus utama pemerintah adalah memperkuat kesatuan wilayah melalui kebijakan maritim yang berlandaskan Deklarasi Djuanda. Djuanda memimpin langkah-langkah konkret untuk memperluas garis pangkal laut (baseline) yang mencakup seluruh perairan antar pulau dalam satu kesatuan wilayah. Tangkilisan (2017) menjelaskan bahwa "Pernyataan Djuanda pada 13 Desember 1957 merupakan tonggak dalam mempertegas kedaulatan NKRI di mata dunia" (hlm. 45). Melalui peran ini, Djuanda tidak hanya berfungsi sebagai menteri teknokrat, tetapi juga tokoh ideologis yang berupaya menyatukan konsep daratan dan lautan sebagai satu kesatuan geopolitik Indonesia.

Pada masa Kabinet Kerja II (1960–1962), arah kebijakan maritim diperkuat melalui penerapan prinsip *archipelagic state* dalam hukum nasional dan diplomasi internasional. Cribb dan Ford (2009) menulis bahwa "Konsep negara kepulauan yang lahir dari Deklarasi Djuanda menjadi dasar diplomasi maritim Indonesia" (hlm. 40). Pernyataan ini menegaskan gagasan Djuanda menjadi pijakan diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan pengakuan internasional terhadap wilayah lautnya. Pemerintah dibawah koordinasi Djuanda menyusun berbagai peraturan pelaksana untuk mengintegrasikan konsep negara kepulauan ke dalam kebijakan hukum laut nasional, yang kemudian menjadi rujukan bagi negosiasi internasional pada era berikutnya.

Djuanda juga memandang kebijakan maritim sebagai alat diplomasi politik luar negeri bebas aktif, sejalan dengan visi yang diinginkan Soekarno. Dalam hal ini, laut bukan hanya batas teritorial, tetapi juga media pemersatu bangsa dan sarana untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia-Afrika. Tangkilisan (2022) menegaskan bahwa "Konsepsi negara kepulauan yang dicetuskan dalam Deklarasi Djuanda akhirnya memperoleh legitimasi internasional melalui UNCLOS 1982" (hlm. 114). Meskipun pengakuan resmi baru diperoleh setelah dua dekade wafatnya Djuanda, kebijakan yang ia rancang pada masa Kabinet Kerja telah meletakkan dasar kuat bagi pengakuan internasional tersebut.

Dalam bidang hukum dan pertahanan laut, Djuanda juga berperan dalam membentuk kesadaran nasional tentang pentingnya laut sebagai bagian integral dari identitas bangsa. Menurut Kartodirdjo (1984), "Periode Demokrasi Terpimpin memperlihatkan peran teknokrat dalam kabinet Soekarno, terutama Djuanda" (hlm. 215). Pandangan ini menegaskan bahwa peran Djuanda bukan hanya dalam perumusan kebijakan ekonomi atau administrasi, tetapi juga dalam memperkuat kesadaran maritim nasional. Ia berusaha memadukan idealisme tentang persatuan nasional dengan kebijakan rasional yang mampu diterima dalam hukum internasional.

Lebih jauh, Lindblad (2011) menyatakan bahwa "Kebijakan ekonomi pasca-kolonial banyak ditentukan oleh teknokrat Indonesia, salah satunya Djuanda

Kartawidjaja" (hlm. 78). Dalam konteks kebijakan maritim, Djuanda mengaitkan pengelolaan laut dengan pembangunan ekonomi nasional. Ia mendorong eksplorasi sumber daya laut, penguatan pelabuhan, dan jalur perdagangan laut sebagai bagian dari strategi ekonomi terpimpin. Dengan hal itu, kebijakan maritim Djuanda tidak hanya menegaskan kedaulatan politik, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi maritim.

Melalui gagasannya, Djuanda berhasil mengubah paradigma bangsa terhadap laut. Jika sebelumnya laut dilihat sebagai pemisah antar pulau, maka setelah Deklarasi Djuanda laut dianggap sebagai pengikat, pemersatu dan memperkuat wilayah NKRI. Pandangan ini juga ditekankan oleh Ricklefs (2008) yang menyebut bahwa "Demokrasi Terpimpin merupakan masa konsolidasi kekuasaan Soekarno dengan melibatkan peran teknokrat" (hlm. 300). Peran Djuanda sebagai teknokrat maritim dalam Kabinet Kerja menjadi fondasi penting bagi politik kelautan Indonesia modern dan membentuk kesadaran geopolitik bangsa terhadap pentingnya laut bagi kedaulatan nasional.

Kontribusi Djuanda dalam kebijakan maritim dan Deklarasi Djuanda pada masa Kabinet Kerja I-III merupakan tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Ia berhasil menjadikan kebijakan maritim bukan hanya urusan teknis, tetapi strategi geopolitik yang menyatukan kedaulatan, ekonomi, dan diplomasi nasional. Melalui Deklarasi Djuanda, Indonesia memperoleh identitas sebagai negara kepulauan yang berdaulat secara utuh di mata dunia.

### **Hubungan Djuanda dengan Soekarno dalam struktur Demokrasi Terpimpin**

Dalam struktur pemerintahan era Demokrasi Terpimpin (1959–1963), hubungan antara Ir. Djuanda Kartawidjaja dan Presiden Soekarno bersinergi antara kekuasaan politik karismatik dengan rasionalitas teknokratik. Soekarno memegang kuasa penuh sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, sedangkan Djuanda berperan sebagai figur teknokrat yang mengisi ruang administratif dan rasional pada dinamika politik yang sarat ideologi. Menurut Simanjuntak (2003), "Djuanda merupakan teknokrat yang dipercaya Soekarno dalam menyusun kebijakan di Kabinet Kerja" (hlm. 122). Hubungan ini didasarkan pada kepercayaan personal dan profesional, di mana Soekarno memandang Djuanda sebagai pejabat non-partisan yang loyal terhadap negara namun tidak terlibat dalam konflik politik partai.

Soekarno melihat Djuanda sebagai perpanjangan tangan dari ideologi Demokrasi Terpimpin dalam bidang administrasi pemerintahan. Dalam pandangan Ricklefs (2008), "Demokrasi Terpimpin merupakan masa konsolidasi kekuasaan Soekarno dengan melibatkan peran teknokrat" (hlm. 300). Djuanda menjadi penghubung antara visi politik Soekarno yang ideologis dan kebutuhan praktis birokrasi yang menuntut efisiensi. Ia membantu mengimplementasikan kebijakan politik Soekarno, seperti penguatan lembaga negara, penyederhanaan sistem kabinet, dan pembentukan dewan-dewan penasehat. Peran Djuanda sebagai Menteri Utama menunjukkan bahwa Soekarno tidak hanya mengandalkan loyalitas politik, tetapi juga keahlian teknokratik dalam menjalankan pemerintahan.

Dalam Kabinet Kerja I (1959–1960), Soekarno menugaskan Djuanda untuk mengoordinasikan berbagai kementerian agar tetap fokus pada pembangunan nasional dan stabilitas ekonomi. Lindblad (2011) menegaskan bahwa "Kebijakan ekonomi pasca-kolonial banyak ditentukan oleh teknokrat Indonesia, salah satunya Djuanda Kartawidjaja" (hlm. 78). Hal ini memperlihatkan bahwa kepercayaan Soekarno terhadap Djuanda bukan hanya bersifat politis, tetapi juga didasarkan pada keahliannya dalam bidang ekonomi dan administrasi. Djuanda mampu menerjemahkan ide-ide besar

Soekarno tentang kemandirian ekonomi ke dalam kebijakan konkret yang realistik dan terukur.

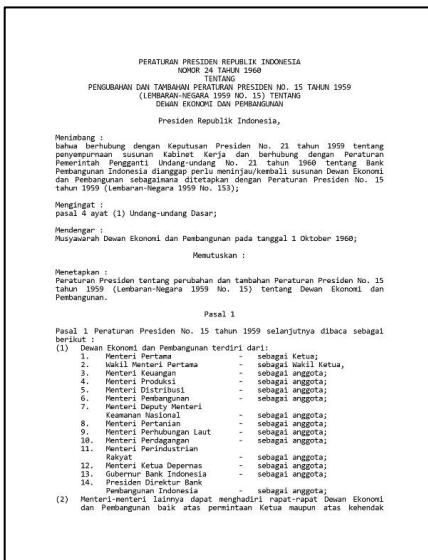
Sementara dalam Kabinet Kerja II (1960–1962) dan III (1962–1963), hubungan mereka semakin erat dalam konteks diplomasi dan politik luar negeri. Djuanda menjadi tokoh penting yang membantu Soekarno memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional melalui kebijakan maritim dan politik bebas aktif. Seperti dijelaskan oleh Cribb dan Ford (2009), “Konsep negara kepulauan yang lahir dari Deklarasi Djuanda menjadi dasar diplomasi maritim Indonesia” (hlm. 40). Soekarno menggunakan gagasan maritim Djuanda sebagai simbol geopolitik untuk menegaskan kedaulatan Indonesia dan menolak dominasi Barat. Dengan demikian, kerja sama keduanya bukan hanya bersifat internal administratif, tetapi juga berimplikasi pada arah kebijakan luar negeri Indonesia.

Secara ideologis, hubungan Soekarno dan Djuanda didasari oleh kesamaan visi tentang nasionalisme dan persatuan bangsa, meski berbeda dalam pendekatan. Soekarno lebih bersifat karismatik dan ideologis, sedangkan Djuanda pragmatis dan administratif. Kartodirdjo (1984) menyatakan bahwa “Periode Demokrasi Terpimpin memperlihatkan peran teknokrat dalam kabinet Soekarno, terutama Djuanda” (hlm. 215). Djuanda menjadi figur yang menjaga keseimbangan antara idealisme revolusioner Soekarno dan kebutuhan birokrasi modern. Ia juga menjadi mediator antara kekuatan sipil, militer, dan partai politik, sehingga hubungan keduanya berfungsi sebagai poros stabilitas pemerintahan pada masa penuh gejolak tersebut.

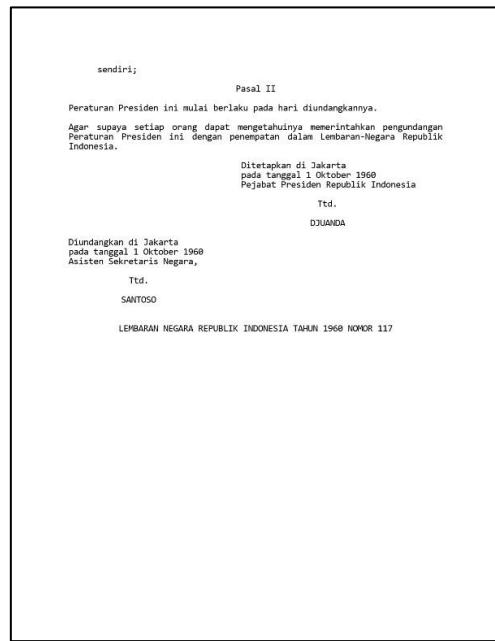
Hubungan erat ini juga tercermin dalam kebijakan maritim yang menjadi simbol sinergi antara ide dan implementasi. Soekarno menegaskan pentingnya laut sebagai “pemersatu nusantara,” sementara Djuanda memformalkan konsep tersebut melalui Deklarasi Djuanda dan kebijakan hukum laut nasional. Butcher (2009) menjelaskan bahwa “Deklarasi Djuanda menandai perubahan paradigma besar dalam hukum laut internasional dengan menegaskan kedaulatan Indonesia atas laut di antara pulau-pulau” (hlm. 36). Dalam konteks ini, Djuanda melaksanakan visi geopolitik Soekarno ke dalam bentuk kebijakan konkret yang diakui dunia internasional.

Dengan demikian, hubungan Djuanda dan Soekarno pada masa Kabinet Kerja I-III bersifat komplementer dan strategis: Soekarno sebagai pengarah ideologi negara, dan Djuanda sebagai pelaksana teknokratis yang menjembatani gagasan politik dengan kebijakan praktis. Keduanya membentuk pola kepemimpinan khas Demokrasi Terpimpin, di mana idealisme revolusioner berpadu dengan rasionalitas birokratis demi menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

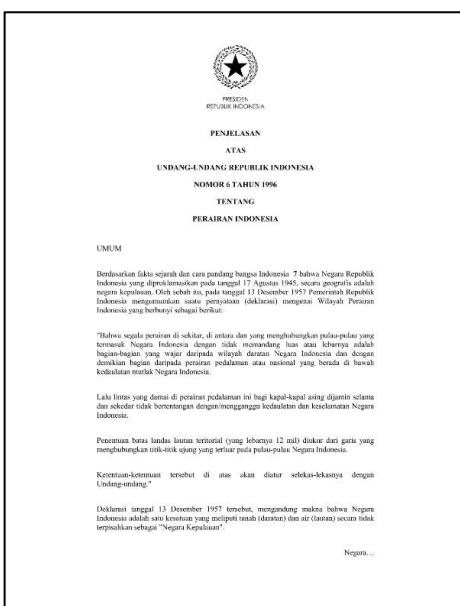
## **Surat Surat Negara yang Berkaitan Djuanda**



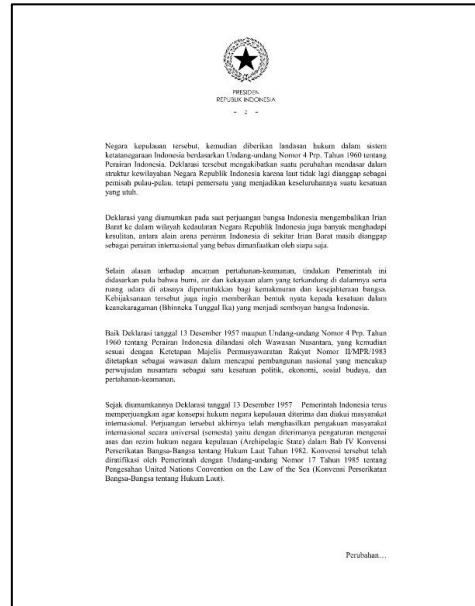
**Gambar 1. Perpres No 24 tahun 1960 tentang Dewan Ekonomi dan Pembangunan (tertera jabatan Menteri Pertama yang juga sebagai Ketua Dewan)**



**Gambar 2. Perpres No 24 tahun 1960 tentang Dewan Ekonomi dan Pembangunan (Penandatanganan Penjabat Presiden yang juga Menteri Pertama)**



**Gambar 3. Penjelasan UU No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Menjelaskan geografi dan batas batas perairan)**



**Gambar 4. Penjelasan UU No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Menjelaskan dasar hukum dan jejak historis)**

Gambar 5. Website Sekretaris Kabinet  
 (Kabinet Kerja 1 : 1959 - 1960)

Gambar 6. Website Sekretaris Kabinet  
 (Kabinet Kerja 2 : 1960 - 1962)

Gambar 7. Website Sekretaris Kabinet  
 (Kabinet Kerja 3 : 1962 - 1963)

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Ir. Djuanda Kartawidjaja memainkan peran yang sangat penting dalam pemerintahan Soekarno, khususnya selama masa Kabinet Kerja I-III (1959–1963). Sebagai seorang teknokrat yang rasional dan profesional, Djuanda menjadi penghubung utama antara idealisme politik Soekarno dan kebutuhan birokrasi yang efisien. Dalam bidang politik, ia berperan menjaga stabilitas pemerintahan dan memediasi kepentingan antar kekuatan politik. Dalam bidang ekonomi, Djuanda menjadi arsitek kebijakan ekonomi terpimpin yang berorientasi pada kemandirian nasional. Sementara dalam bidang diplomasi dan maritim, ia merumuskan Deklarasi Djuanda (1957) yang menjadi dasar pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai Negara Kepulauan.

Melalui kepemimpinan dan gagasan visionernya, Djuanda berhasil menanamkan prinsip Wawasan Nusantara, memperkuat kedaulatan negara, serta memperjelas batas wilayah laut Indonesia. Hubungan sinergis antara Djuanda dan Soekarno dalam struktur Demokrasi Terpimpin menunjukkan perpaduan harmonis antara kekuatan ideologis dan profesionalisme teknokratik. Dengan demikian, kontribusi Djuanda Kartawidjaja bukan hanya penting dalam konteks politik masa itu, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap pembentukan identitas, kedaulatan, dan sistem pemerintahan Indonesia modern.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Butcher, J. G. (2009). Becoming an archipelagic state: The Juanda Declaration of 1957. In R. Cribb & M. Ford (Eds.), *Indonesia beyond the water's edge: Managing an archipelagic state* (pp. 35–54). Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- Cribb, R., & Ford, M. (Eds.). (2009). *Indonesia beyond the water's edge: Managing an archipelagic state*. Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- Kartodirdjo, S. (Ed.). (1984). *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid VI*. Balai Pustaka.
- Lindblad, J. T. (Ed.). (2011). *Bridges to new business: The economic decolonisation of Indonesia*. KITLV Press.
- Penulis UIN. (2019). Peran Ir. H. Djuanda Kartawidjaya dalam meneguhkan wilayah NKRI (1934–1963). *Jurnal Pendidikan Sejarah UIN*, 7(2), 45–58.
- Redfern, W. A. (2010). Sukarno's Guided Democracy and the takeovers of foreign assets. *Journal of Southeast Asian Studies*, 41(3), 437–461.  
<https://doi.org/10.1017/S0022463410000272>
- Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c.1200* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
- Simanjuntak, P. N. H. (2003). Kabinet-kabinet Republik Indonesia: Dari awal kemerdekaan sampai reformasi. Djambatan.
- Tangkilisan, Y. B. (2017). The Declaration of Djuanda 1957. In Proceedings of the International Conference on History Education. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Tangkilisan, Y. B. (2022). Sovereignty on seas: The making of the Declaration of Djuanda 1957. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 655, 112–118. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220107.018>
- Gottschalk, L. (1985). *Understanding history: A primer of historical method*. Alfred A. Knopf.
- Kuntowijoyo. (2003). Metodologi sejarah. Tiara Wacana.

Marwick, A. (2001). The new nature of history: Knowledge, evidence, language. Palgrave.  
Sjamsuddin, H. (2012). Metodologi sejarah. Ombak